

Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum

p-ISSN: 2580-0401

e-ISSN: 2580-0426

Volume 1 Nomor 1 November 2017, hlm 1-54

PELINDUNG

Drs M. Fadil Djamali, M.Si

Ir. Sukadi., M.Si

DEWAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi:

Catur Yuniyanto, SH., M.H.

Sekretaris Redaksi:

Helda Mega Maya, C.P.I.F., S.H., M.H.

Khairul Ahmadi, S.Pd., M.Pd.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. H. M. Rudy Sumiharsono, MM. (IKIP PGRI Jember)

Amin Silalahi, Ph.D. (IKIP PGRI Jember)

Drs. Suyahman, M.Si., M.H. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Ambiro Puji Asmaroini, M.Pd. (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Muhammad Rusdi, S.H., M.Hum. (Universitas Widya Mataram Yogyakarta)

Editor:

Drs. J. Agung Indramoko, M.Pd.

Risa Shoffia, S.H., M.H.

Drs. Yosdy Praseko, M.Pd.

Kesekretariatan

Indra Lely, S.Pd., M.Si.

Nova Eko Hidayanto, S.Pd., M.KPd.

Firmansyah, S.H., M.Si.

Penerbit:

PRODI PPKn IKIP PGRI JEMBER

Jalan Jawa No. 10 – Jember

e-mail: jurnalppkn@gmail.com

laman: <http://jurnal.ikipjember.ac.id/index.php/jppkh>

Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum adalah Jurnal hasil pengabdian, penelitian dan hasil pemikiran bidang pendidikan yang diterbitkan oleh IKIP PGRI Jember. Terbit pertama kali mulai bulan November 2017, dan diterbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November. Redaksi Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum mengundang para penulis untuk mengirimkan hasil penelitian pengembangan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan. Pendapat yang dimuat pada jurnal ini sepenuhnya merupakan pendapat penulis artikel atau tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Redaksi menerima artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Petunjuk Penulisan dapat dibaca pada bagian belakang jurnal. Naskah yang masuk dievaluasi oleh redaksi. Redaksi dapat melakukan perubahan tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

DAFTAR ISI

Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Hukum

Volume 1 Nomor 1 November 2017, hlm 1-54

Contents

1. **KEABSAHAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU** 1
Helda Mega Maya, C.P.I.F (IKIP PGRI Jember)
2. **PERAN IGTKI DALAM MENDORONG MASYARAKAT UNTUK
MENYEKOLAHKAN ANAKNYA** 11
Nova Eko Hidayanto (IKIP PGRI Jember)
3. **PENGARUH MEDIA POHON PINTAR PPK_n TERHADAP PRESTASI
BELAJAR SISWA DI KELAS VIII MTs BUSTANUL ULUM PANTI TAHUN
PELAJARAN 2017/2018** 15
Eka Malida Ciphani, Catur Yuniyanto, dan Khairul Ahmadi (IKIP PGRI Jember)
4. **PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN *FIEL TRIP* TERHADAP HASIL
BELAJAR MATA PELAJARAN IPS TERPADU KELAS VIII DI SMPK
SANTO PETRUS TAHUN PELAJARAN 2016/2017** 23
M. Pradela Wimala N (SMPK PETRUS Jember)
5. **PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR
SISWA PADA MATA PELAJARAN PKN KELAS VIII SEMESTER GANJIL
SMPN 2 SUMBER JAMBE JEMBER TAHUN AJARAN 2016/2017** 33
Moch. Efendi dan J. Agung Indratmoko (IKIP PGRI Jember)
6. **PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KARAKTER PEMIMPIN MENUJU
PERUBAHAN IDEAL** 39
Imam Mawardi (STKIP PGRI Bangkalan)
7. **PENINGKATAN HASIL BELAJAR PPK_n SISWA KELAS X MELALUI
MODEL *SNOWBALL THROWING* DI SMA ISLAM NURUL HIDAYAH
BONDOWOSO** 49
Muhammad Anis, Risa Shoffia, dan Yosdy Praseko (IKIP PGRI Jember)

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KARAKTER PEMIMPIN MENUJU PERUBAHAN IDEAL

Imam Mawardi

STKIP PGRI Bangkalan

Alamat e-mail: ardymaha24@yahoo.com

Abstract. *The success of the government or group based on its the leader. There are four basic characteristics of the leader, 1) the regularity of the leader's action is measured by hierarchy value. The value becomes a guidance for each action; 2) Coherence that gives a bravery, makes someone be unwavering on principle, not easily affected on the new situation, or afraid to face the risk. Coherence is the basic to create trust for one to each other. Without coherence, someone's the credibility will be cranky; 3) Autonomy, someone internalizes the rule from the outside to personal value. This can be seen on personal action or decisions without intervention from the others; 4) Persistence and loyalty. Persistence is a reflection of someone to achieve a good thing. Loyalty is the basic of respect for the chosen commitment. In addition, the empowerment of a leader to face era development needs a strong basic on him/her, while Pancasila is the right answer to overcome the problems that occur. Pancasila is used as a foundation of Leader's character and can be a good reason to do and act to solve the problems that exist in Indonesia.*

Keywords: *Pancasila, Leader, and Character*

PENDAHULUAN

Kejadian- kejadian yang terjadi di Indonesia pada akhir- akhir ini, merupakan dampak dari satu permasalahan, atau dapat dikatakan sebagai penyakit yaitu *krisis*. Krisis ini bukan hanya berdampak pada satu atau dua golongan, namun, dapat pula menghancurkan persatuan Indonesia, seperti penyakit kronis, perlahan tapi dalam memusnahkan tubuh kita. Yang *pertama* krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah yang dianggap sebagai pemimpin kurang bertanggung jawab dan memperhatikan keadaan masyarakat. *Kedua* krisis karakter pemimpin, krisis inilah yang kerap memancing kemarahan rakyat. Pemimpin yang tidak bersikap selayaknya pemimpin, yaitu mengayomi, melindungi serta membingbing masyarakat merupakan kewajiban seorang pemimpin, tidak cukup sampai di situ, seorang pemimpin dapat

menjadi panutan bagi rakyatnya baik dalam segala bidang, dari segi berucap hingga mengambil sebuah keputusan.

Salah satu dampak dari krisis tersebut adalah adanya aksi yang secara berkesenambungan terjadi di Indonesia, misalnya, demo yang terjadi pada tanggal 4 November 2016 (411) dilanjutkan dengan demo pada tanggal 2 Desember 2016 (212) dan terus berguling pada tahun 2017 seperti tanggal 5 Mei 2017. Ini merupakan indikasi lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah atau pemimpin. Penyebab kejadian - kejadian tersebut tidak lepas karena hilangnya karakter dari seorang pemimpin di negara ini.

Secara umum pembanguna karakter bangsa setidaknya mencakup empat lingkup, lingkup keluarga, lingkup pendidikan, lingkup masyarakat dan pemerintah. Pada lingkup keluarga, wahana pembelajaran dan pembiasaan harus dilakukan oleh orang tua

terhadap sebagai anggota keluarga. Pada lingkup pendidikan adalah wahana pembinaan dan pengembangan melalui keteladanan tokoh masyarakat, sedangkan pada lingkup pemerintah wahana pembangunan karakter bangsa melalui keteladanan aparat penyelenggara dan tokoh-tokoh elit bangsa (Taniredja & Haryono, 2014, hal. 5). Maka, pada dasarnya pemimpin harus berkarakter baik, karena peran pemimpin sangat besar dalam kehidupan, sebagai tokoh, teladan, serta sebagai panutan bagi pengikutnya, bukan hanya sekedar apa yang ia lakukan untuk orang lain, melainkan apa yang ia lakukan untuk dirinya sendiri, artinya setiap gerak-gerik dari pemimpin akan diperhatikan terus, walau pun bukan bentuk perintah untuk dilaksanakan, namun masyarakat merasa harus memperhatikan pemimpinnya dalam setiap saat.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu menginginkan kedamaian dan menciptakan keharmonisan, menjaga persatuan dan kesatuan, tentu hal tersebut dapat dicapai jika seorang pemimpin atau penguasa memiliki karakter yang baik, budi pekerti yang luhur, niscaya pemimpin dapat mempengaruhi manusia dengan mudah dan baik. Robbins mengatkan dalam (Rifqi, Ahmad Elistha, & Mitha, 2010), bahwa pemimpin merupakan seorang yang kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan untuk di jalankan, haruslah berkarakter baik, karena dengan karakter tersebut dapat menghasilkan tujuan yang baik serta pengikut yang baik.

Pemahaman Jawa, kekuasaan sangat tergantung dari keluhuran budinya. Ia harus *sepi ing pamrih*, artinya ia tidak boleh terikat oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ia harus bersih dari angkara murka supaya dapat menjadi *heneng, bening, hawas, dan heling* (diam, jernih, awas, ingat). Sesuai dengan sifat kekuasaan sendiri cara pemakaiannya harus halus. Kehalusan pemerintahan merupakan materi keaslian kekuasaan seorang raja. Ia diharapkan mencapai keadaan sejahtera, adil, dan tentram dalam masyarakat tanpa perlu memakai cara-cara kasar. Seakan- akan

semuanya akan berjalan sendirinya (Suseno, 2015, hal. 37).

Pancasila mempunyai peranan penting sebagai pembentuk karakter seorang pemimpin di Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila maka pemimpin di Indonesia dapat menjadi pemimpin yang ideal bagi masyarakat, rakyat dan golongan. Sebagai mana yang dikatakan oleh (Taniredja & Haryono, 2014, hal. 7) bahwa manusia Indonesia ideal adalah manusia yang pandangan hidupnya dituntun oleh Pancasila. Oleh karenanya, pemimpin yang ideal pun semestinya memiliki karakter Pancasila.

PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Landasan

Sesuai yang di ketahui bahwa Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran bangsa atau dapat disebut sebagai Ideologi bangsa. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa awal dirumuskan Pancasila kedudukannya adalah sebagai dasar negara. Hal ini tampak pada saat dirumuskan adalah untuk menemukan rumusan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Kemudian dalam membentuk dan menjalankan negara maka Pancasila berfungsi sebagai Ideologi Negara yang di gunakan oleh penyelenggara negara untuk menjalankan organisasi Negara (Muchtar, 2016, hal. 122).

Pancasila dapat dikatakan sebagai pandangan hidup, artinya Pancasila memang merupakan suatu ide yang menjadi cita-cita bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang di cita-citakan, terkandung dasar pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik (Kaelan, 2013, hal. 43).

Menurut Kaelan dalam (Rahayu, 2015, hal. 114) Pancasila juga sebagai paradigma yaitu kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir sebagai titik tolak pandangan hidup, sumber nilai kerangka berfikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan.

Pancasila memiliki semboyan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam *idiom nation-state* berikut semangat nasionalisme yang menyertainya. Tentu dapat berpengaruh besar dalam menciptakan sebuah persatuan dengan tujuan yang sama yaitu menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadaban. Semboyan tersebut tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang yang berbeda, seperti halnya yang dituliskan oleh Empu Tantular: “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa”. Menunjukkan bahwa Pancasila merupakan alat persatuan dari keanekaragaman yang ada di negara Indonesia, multikultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia (Irhandayaningsih, 2012 , hal. 3).

Mengenai Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika*, maka jelas Pancasila adalah sebuah landasan yang dibuat sebagai tujuan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu di setiap lini yang berbeda. Pancasila sebagai acuan dalam setiap langkah bertindak dan mengambil keputusan. Bentuk implementasi, salah satunya adalah seorang Pemimpin yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan mengayomi masyarakat atau golongan, dari berbagai latar belakang yang berbeda ras, suku, budaya dan agama yang hidup di Indonesia, diharuskan memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, untuk menciptakan sebuah perubahan yang baik dan sejahtera bagi bangsa dan negara.

Menurut bahasa sansekerta Pancasila berasal dari dua kata yakni “panca” yang berarti “lima” dan “sila” yang berarti “asas atau prinsip”. Sehingga Pancasila mengandung arti lima buah prinsip atau asas. Angka *Lima* menurut Bung Karno dalam Pancasila selain memang akar dari jiwa bangsa Indonesia, namun angka tersebut diyakini mempunyai kekeramatan dalam antropologi masyarakat Indonesia yaitu rukun Islam ada Lima, jari kita lima se tangan, kita mempunyai Panca Indra dan masih banyak lagi yang merupakan indikasi bahwa angka lima memang keramat di Indonesia (Latif,

2015, hal. 17). Asas atau prinsip-prinsip tersebut antara lain: a) Ketuhanan Yang Maha Esa b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab c) Persatuan Indonesia d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut (Nuriswanto, 2011, hal. 7-9) di dalam Pancasila terdapat butir-butir yang harus diteladani, setiap butir-butirnya memiliki arti penting yang menekankan kepada rakyat Indonesia untuk mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut penjabaran butir-butir yang terkandung dalam Pancasila:

- a. Butir - butir Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
 - (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. (7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- b. Butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab
 - (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan

kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. (8) Berani membela kebenaran dan keadilan. (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

c. Butir-butir sila persatuan Indonesia

(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Butir-Butir Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat di liputi oleh semangat kekeluargaan. (5) Menghormati dan menjunjung tinggi

setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. (6) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. (7) Di dalam musyawarah di utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

e. Butir-butir Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. (9) Suka bekerja keras. (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

2. Nilai - nilai Pancasila sebagai Landasan

Menilai berarti menimbang yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai

dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa dan kepercayaan. Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, serta religius atau tidak religius. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama) (Ayu, Holilulloh, & M, 2014). Maka dari itu Pancasila sebagai landasan mempunyai nilai-nilai yang mencakup semuanya. Nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Nilai ini dikatakan nilai Pancasila yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai sila pertama ini, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan baik jika nilai atau tindakan bertentangan dengan nilai dan kaidah hukum Tuhan (Rahman, Surip, & Syarbaini, 2015, hal. 180). Namun, menurut Bung Karno dalam pidatonya didepan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 mengatakan bahwa “prinsip ketuhanan” Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi setiap masing-masing orang Indonesia wajib ber Tuhan menurut keyakinannya masing-masing, artinya yang kristen bertuhan menurut petunjuk Isa AL Masih, Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Bhuda menjalankan ibadah menurut kitab-kitab yang ada padanya. “Tetapi marilah kita semua bertuhan” Pancasila (Taniredja & Haryono, 2014, hal. 8). Dari itu pemimpin selain *regius* (bertuhan) namun juga harus mempunyai jiwa nasionalis, artinya pemimpin harus bersifat profesional dalam bertindak dan mengambil sebuah kebijakan, sebagai pemimpin yang mempunyai masyarakat yang beraneka ragam keyakinan.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Artinya manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabahnya sebagai makhluk tuhan yang maha Esa, yang sama drajatnya, tidak dibedakan dengan yang lain. Disamping

itu kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan, menanamkan sikap hormat dan menghormati, mengakui adanya hak dan kewajiban yang sama pada setiap warganya dan melaksanakan keadilan, tidak ada intimidasi antara sesama, semua mendapat perlindungan sebagai warga negara Indonesia Pancasila (Taniredja & Haryono, 2014, hal. 10-11).

c. Sila Persatuan Indonesia

Artinya suatu perbuatan dikatakan baik apa bila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan (Rahman, Surip, & Syarbaini, 2015, hal. 180). Dalam sila persatuan ini, bangsa Indonesia harus dapat memahami keaneka ragaman bangsa, baik dari suku, budaya, ras, bahasa dan agama. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena rasa satu yang begitu kuatnya, maka dari padanya timbul rasa cinta bangsa dan tanah air. Akan tetapi perlu diketahui bahwa rasa cinta bangsa dan tanah air yang kita miliki di Indonesia bukan yang menjurus kepada *chauvinisme*, yaitu rasa yang mengagungkan bangsa sendiri, dengan merendahkan bangsa lain. Jika hal ini terjadi, maka bertentangan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun ditulis cinta bangsa dan tanah air, tidak dimaksudkan untuk *chauvinisme*.

Jelaslah bahwa konsekuensi lebih lanjut dari kedua hal tadi adalah menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada akhir – akhir ini justru menunjukkan gejala disintegrasi bangsa. Hal ini sejalan dengan pengertian persatuan dan kesatuan.

- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat, Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke 4 adalah penjelasan Negara demokrasi. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakannya.

Dalam pidatonya Bung Karno didepan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 tentang dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. Bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua untuk semua”, “satu buat semua”, “semua buat satu”. Saya yakin bahwa kuat mutlaknya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan (Taniredja & Haryono, 2014, hal. 13).

- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menurut (Taniredja & Haryono, 2014, hal. 15) berdasarkan ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia depan Bab IV, khusus dalam bidang religius, bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 memerlukan beberpa indikator. Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya;
- 2) Terwujudnya toleransi antar dan anatar ummat beragama;
- 3) Terwujudnya penghormatan terhadap martabat manusia.

3. Karakter Pemimpin Menuju Perubahan Ideal

Pernyataan mengenai definisi kepemimpinan di-nyatakan oleh para ahli. Yukl (1989) dalam (Narsa, 2012, hal. 102- 103) mengatakan bahwa, *The term leadership means different things to different people*. Yukl (1989) juga mengutip dari tujuh penulis mengenai definisi *leadership*, satu diantaranya adalah dari Jacobs (1970), yang mendefinisikan, *Leadership is an interaction between persons in which one presents information of a short and in such a manner that the other becomes convinced that this out-comes...will be improved if he behaves in the manner suggested or desired*. Robbins (1997) dalam (Narsa, 2012, hal. 103) mendefinisikan *leadership is the notion that leaders are individuals who, by their actions, facilitate the movement of a group of people toward a common or share goals*. Ini berarti kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk memengaruhi orang lain atau unit organisasi untuk mencapai tujuannya. Disamping itu, inti kepemimpinan sebenarnya adalah melakukan hal yang benar. Pemimpin harus dapat menggerak-kan, memuaskan dan menumbuhkan pengikut yaitu motivasi dan menghidupkan potensinya, juga harus mampu menangani paradoks-paradoks dan menjelas-kan maknanya.

Lhutans dalam (Muhdiyanto, 2011, hal. 61) melukiskan kepemimpinan sebagai suatu proses membujuk (*inducing*) orang-orang lain menuju sasaran bersama. Kemampuan ini akan mendorong pemimpin lebih efektif dalam hubungannya dengan bawahan.

Maka dari itu untuk mengukur unsur-unsur yang perlu ada pada seorang pemimpin antara lain adalah entusiasme, integritas, ulet, *fair*, hangat, rendah hati, dan percaya diri. Seorang pemimpin tidak perlu populer, tetapi harus dihormati. Hal ini karena orang disekitarnya tidak akan merasa nyaman apabila seorang pemimpin selalu menuntut orang lain dengan standar kerja (kinerja) yang tinggi. Seorang pemimpin juga tidak memperlakukan orang di sekitarnya secara berbeda, tetapi memperlakukannya secara sama dan tidak ada anak emas,

dalam mengambil keputusan dilakukan secara mandiri, menghargai prestasi, dan menghukum yang bersalah atau tidak berprestasi (Frans & H. Winarta, 2009, hal. 208).

Selain itu, mengenai karakter seorang pemimpin. Aada seorang pencetus pendidikan karakter asal Jerman mengatakan bahwa ada empat ciri dasar yang membentuk karakter seorang pemimpin, 1) keteraturan interior di mana setiap tindakan tindakan diukur berdasarkan hirarki nilai. Nilai menjadi pedoman setiap tindakan; 2) koherensi yang memberi keberanian, membuat seorang teguh dalam prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru, atau takut menghadapi resiko. Koheren merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama yang lain. Tidak adanya koheren dapat meruntuhkan kredibilitas seseorang; 3) otonomi, disitu seseorang menginternalisasikan aturan dari luar hingga menjadi nilai-nilai pribadi. Ini dapat dilihat atas tindakan atau keputusan pribadi tanpa intervensi dari orang lain; 4) keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan cerminan seseorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap baik. Kesetiaan merupakan dasar penghormatan atas komitmen yang pilih (Taniredja & Haryono, 2014, hal. 3-4).

Namun, hal tersebut tidak dapat berjalan dengan sempurna jika tidak di topang dengan pemahaman dan implementasi Pancasila. Misalnya, sila pertama ketuhanan yang maha Esa, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk religius saja, artinya bukan hanya membangun *hablu minallah* tapi juga *hablu min nas*, yaitu menjalin hubungan dengan manusia merupakan manivestasi keimanan seorang pada Tuhan, baik itu kasih sayang, tolong menolong, serta saling menjaga antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada bentuk kekerasan apapun diantara mereka, toleransi dan gotong royong antara sesama. Pemimpin yaang bertuhan tidak akan mudah tergiur oleh pengaruh-pengaruh yang dapat menjauhkan dirinya dengan Tuhannya (Taniredja & Haryono, 2014).

Pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai pribadi

yang luhur supaya dapat memimpin dengan baik dan mengambil kebijakan dengan tepat. Yang dimaksudkan disini pemimpin adalah tonggak berjalannya suatu golongan atau masyarakat, berjalan atau tidaknya suatu kelompok atau masyarakat itu tergantung pada keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Kulaitas seorang pemimpin berdasarkan kepribadiannya. Jika ia memiliki pribadi yang baik dan cermat dalam mengambil tindakan, maka suatu kelompok masyarakat yang dipimpinpun akan berjalan dengan baik dan dapat menciptakan perubahan ideal. Namun jika sebaliknya yang terjadi, artinya penguasa atau pemimpin tidak bertanggungjawab dan percaya pada kemampuannya untuk menindas segala perlawanan. Maka bukan hanya krisis kepercayaan masyarakat pada pemimpin saja, tetapi kehancuran kelepok, masyarakat atau negara akan terjadi, akibat dari krisis karakter pemimpin yang kurang ideal (Suseno, 2015).

4. Pemimpin Ideal Menuju Perubahan Ideal

Pemimpin yang ideal akan memabawa perubahan yang baik. Maka yang harus dipertanyakan adalah bahwa pemimpin yang ideal di Indonesia itu seperti apa? Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa pemimpin ideal adalah seorang yang mempunyai kopotensi dalam memimpin yaitu sebagai seorang pemimpin di Indonesia harus mengacu pada Pancasila, dalam menentukan segala aspek, baik berkenaan kebijakan, pendapat ataupun kepusan. Artinya pemimpin ideal di Indonesia mempunyai jiwa karakter Pancasila dalam setiap ia mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Dalam hal ini, mengenai pemimpin yang berkarakter Pancasila (Taniredja & Haryono, 2014, hal. 15: 19) memberi pemaparan sebagai berikut:

- a. Pemimpin harus menjunjung tinggi ketuhanan, selain itu pemimpin juga harus bertuhan. Dengan mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan, maka pemimpin akan tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perintah yang diberikan oleh Tuhan lewat agama. Sedangkan setiap agama memerintahkan

pada perbuatan yang baik, misalnya, untuk tidak mencuri dan menanamkan rasa tolong menolong antar sesama, toleransi dan gotong royong. Oleh karena itu dalam pidatonya 1 Juni itu Bung Karno menganjurkan bahwa rakyat Indonesia harus bertuhan.

- b. Dengan menghayati sila kedua berarti pemimpin yang berkarakter Pancasila adalah pemimpin yang menegakkan Hak Asasi Manusia secara universal. Pembelaan manusia tidak hanya terbatas pada manusia yang ada di batas-batas Indonesia. Lebih jauh dari pada itu, penegakan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan di dunia. Hal ini lantaran prinsip nasionalisme yang ada di dalam Pancasila adalah nasionalisme yang bukan saja memberikan kehidupan dan perlindungan bagi bangsanya sendiri, melainkan perlindungan terhadap manusia-manusia diseluruh dunia. Maka dari itu pemimpin yang berkarakter Pancasila harus mengpayakan tatanan hidup manusia yang harmonis, tidak saling menindas dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- c. Karakteristik pemimpin ideal Indonesia yang selanjutnya adalah persatuan. Pemimpin yang seperti ini yang pertama-tama sadar akan adanya keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, pemimpin ini juga sadar bahwa tanpa adanya persatuan maka negara ini akan terpecah-pecah hancur lebur. Maka, pemimpin Indonesia ideal harus menempatkan persatuan sebagai *core* pemikiran dan pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. Selain itu, berdasarkan sejarah bahwa Indonesia terbentuk dengan adanya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah hingga pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan. Maka dari itu, pemimpin harus dapat netral dari berbagai macam permasalahan dari orang-orang yang berbeda, suku, ras dan budaya, dengan tujuan dan perubahan yang ideal.
- d. Berkenaan dengan sila yang empat.

Pemimpin dituntut untuk memiliki karakter demokratis. Ia menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kehidupan bernegara baik itu dalam bidang politik atau ekonomi. Dalam bidang politik, pemimpin berkarakter Pancasila tidak diperkenankan berlaku otoriter, menututelingat terhadap tuntutan rakyat. Mestinya, pemimpin peka dan memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Selain itu pemimpin Indonesia tidak boleh menghalangi seluruh warganegara dalam berpartisipasi dalam lapangan ekonomi. Pemimpin Indonesia menolak segala macam monopoli dan oligopoli segelintir orang dalam kehidupan ekonomi bangsa. Kecuali, dalam cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- e. Berdasarkan sila kelima, pemimpin harus berlaku adil terhadap sesama, membudayakan gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, menghargai hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi dan favoritisme.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menuju pada sebuah perubahan yang ideal, seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang ideal juga. Karakter ideal di Indonesia adalah karakter yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan setiap berpijaknya.

PENUTUP

Pancasila adalah ruh yang memberi kehidupan bagi bangsa Indonesia dalam segala hal. Sebagai sudut pandang, dasar, atau bahkan sebagai landasan. Maka dari itu untuk mencapai sebuah perubahan yang ideal di Indonesia pemimpin harus dapat memahami, menjiwai, dan mengimplementasikan Pancasila sebagai landasan. Pancasila adalah jawaban dari permasalahan-permasalahan yang selama ini melanda Indonesia hingga saat sekarang. Artinya, pemimpin tidak memegang teguh Pancasila sebagai landasan ia berpijak, dalam mengambil keputusan, serta berfikir. Maka dari itu, pemimpin dapat

mencapai sebuah perubahan yang baik, ideal bagi masyarakat, golongan, rakyat dan negara jika Pancasila benar-benar dijadikan landasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, F. H., Holilulloh, & M, A. M. 2014. Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila Terhadap Sikap Moral Dalam Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 2. No. 7 (2014).
- Frans, & H. Winarta. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Irhandayaningsih, A. 2012. Peranan Pancasila Dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda Di Era Global. *Humanika*. Vol 16. Th. IX Juli-Desember 2012. 3.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila. Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. 2015. *Negara Palipurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchtar, S. A. 2016. *Ideologi Pancasila: Kajian Filsafat teori Politik dan Pendidikan*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Muhdiyanto. 2011. Kepemimpinan Transformasional dan Komitmen Organisasional: Pemberdayaan sebagai Variabel Mediasi. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi*, 61.
- Narsa, I. M. 2012. Karakteristik Kepemimpinan: Transformasional versus Transaksional. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol 14. No. 2 (2012): September 2012, 102- 103.
- Nuriswanto, H. 2011. Arti dan Makna Sebenarnya dari Pancasila sebagai Landasan Negara Indonesia. *Pancasila*, 6.
- Rahayu, D. P. 2015. Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia*. Vol 91 (2015), 114.
- Rahman, Surip, N., & Syarbaini, S. 2015. *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rifqi, Ahmad Elistha, & Mitha. 2010. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Akuntan Pemerintah (Studi Empiris pada Akuntan BPKP). *Jurnal Ekonomi*. Universitas Riau. Vol 18, No 03. 15 Jan 2013.
- Suseno, F. M. 2015. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Sasar Kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taniredja, T., & Haryono, M. Y. 2014. *Pemimpin Berkarakter Pancasila*. Bandung: Alfabeta.